

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGOPTIMALKAN POTENSI EKONOMI LOKAL MELALUI INOVASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Nasya Handini

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Mely Darwina

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Yudistira

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Wahjoe Pangestoeti

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Alamat: Jl. Politeknik, KM.24, Senggarang, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, 29111

Korespondensi penulis: nhandini@student.umrah.ac.id, mdarwina@student.umrah.ac.id, yudistira@student.umrah.ac.id, wahjoe.pangestoeti.lecture@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui inovasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Dalam era otonomi daerah, kewenangan yang lebih luas menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga sebagai fasilitator dan inovator dalam merancang kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan lokal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka, penelitian ini menelaah teori, kebijakan, serta praktik inovatif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Hasil studi menunjukkan bahwa keberhasilan optimalisasi potensi ekonomi lokal sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta keberanian kepala daerah dalam menerapkan inovasi lintas sektor, seperti perencanaan partisipatif, pengembangan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan kemitraan multi-pihak. Inovasi kebijakan yang dirancang secara kontekstual dan berorientasi pada keberlanjutan terbukti memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian lingkungan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi kelembagaan, digitalisasi sistem perencanaan, dan penguatan kolaborasi antar aktor sebagai strategi untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang berkelanjutan dan resilien di tingkat daerah.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Potensi Ekonomi Lokal, Inovasi Kebijakan, Pembangunan Berkelanjutan, Otonomi Daerah, Ekonomi Hijau, Partisipasi Masyarakat.

LATAR BELAKANG

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan dan prinsip yang mengatur cara manusia berinteraksi satu sama lain dan menjalani

Received Juli 28, 2025; Revised Agustus 30, 2025; September 16, 2025

* Nasya Handini, nhandini@student.umrah.ac.id,

kehidupan mereka dalam masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk menjaga ketertiban sosial yang mencakup lembaga-lembaga dan prosedur yang digunakan untuk menerapkan peraturan tersebut di masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja juga memberikan gagasan hukum bahwa hukum memfasilitasi berbagai proses perubahan dalam masyarakat sehingga dianggap memiliki hubungan yang kuat. Konsep "*Law as a tool of social engineering*" adalah salah satu gagasan Mochtar Kusumaatmadja yang menekankan bahwa dalam konteks pembangunan hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat ekonomi dan secara umum keberhasilan pembangunan (Kusumaatmadja, 2002). Perangkat hukum yang kuat bukanlah satu-satunya faktor yang mendorong ekonomi. Namun pembangunan ekonomi gagal perangkat hukum juga akan diperhatikan sebagai faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut. Selain itu pembangunan negara telah berlangsung selama lebih dari setengah abad masih menghadapi banyak tantangan, bahkan hambatan yang dapat melambatkan kemajuan pembangunan ekonomi. (Sudiro, 1997).

Salah satu pilar desentralisasi pemerintahan Indonesia adalah autonomi daerah, hal tersebut telah memberikan pemerintah daerah otoritas yang lebih besar untuk mengatur kebijakan dan sumber daya di wilayahnya masing-masing kebijakan yang berkaitan dengan otonomi daerah. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah untuk meningkatkan produktivitas pelayanan publik untuk mendorong pembangunan daerah dan memungkinkan masyarakat lokal untuk berkontribusi pada pengambilan keputusan yang penting direktur pada kehidupan mereka. Salah satu tujuan kebijakan ini adalah mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat lokal melalui peningkatan akses terhadap sumber daya dan kualitas hidup yang lebih baik. Meskipun otonomi daerah diantisipasi dalam meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal berdampak langsung dari kebijakan, pemberdayaan masyarakat seringkali bertentangan dengan hal tersebut. Implementasi kebijakan sulit bagi banyak daerah ini secara efektif termasuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang inklusif dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses tersebut.

Konsep autonomi daerah berarti memberikan kebebasan dan wewenang kepada sumber daya lokal dan kepentingan lokal yang dikelola oleh pemerintah daerah sesuai

dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah. Tujuan dari konsep ini adalah untuk mendorong orang untuk berpartisipasi secara aktif masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya dan pengambilan keputusan lokal. Potensi dan Variasi Daerah: Hal ini harus dipertimbangkan saat menerapkan otonomi daerah kemungkinan dan keanekaragaman daerah (Indonesia, 1999). Otonomi Daerah bertujuan untuk memaksimalkan potensi ekonomi yang ada. ada di wilayah tersebut. Diharapkan bahwa pemerintah daerah akan memanfaatkan wewenang yang diberikan. dapat mengoptimalkan potensi ekonomi setiap wilayah. Ini. menggabungkan pemanfaatan sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi lokal. peningkatan investasi dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. tertulis. Diharapkan bahwa daerah memiliki kemampuan untuk membuat kebijakan dan strategi mereka sendiri melalui otonomi daerah. pembangunan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal sehingga dapat. berkontribusi secara besar-besaran pada pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan (Ismal, 2002).

Namun otonomi daerah tidak selalu berhasil mengimbangi pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Marine Geopark Natuna dikelola di Kepulauan Riau. Meskipun telah ditetapkan sebagai Geopark nasional kemajuan di wilayah ini masih menghadapi banyak tantangan terutama karena tidak ada kebijakan lokal yang kuat. Menurut penelitian masalah utama yang menghambat pengembangan Geopark Natuna adalah masih minimnya kebijakan lokal yang terintegrasi untuk mendukung pengelolaan kawasan tersebut karena belum ada perda khusus yang mengatur secara komprehensif tentang pengelolaan Geopark. Akibatnya tidak ada koordinasi yang efektif tentang bagaimana menjalankan program konservasi mendorong pariwisata yang berkelanjutan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Meskipun otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah tanpa aturan dan komitmen yang jelas sulit untuk memanfaatkan potensi lokal dan menjaga kelestarian lingkungan. Sebaliknya Marine Geopark Raja Ampat di Papua Barat adalah contoh provinsi yang sukses karena memiliki peraturan yang jelas seperti Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 27 Tahun 2008 dan Perda Nomor 8 Tahun 2016 dan memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi digital untuk mempromosikan dan membuat wisatawan lebih mudah masuk. Namun kedua wilayah tersebut masih

menghadapi masalah yang serupa: bagaimana mengimbangi keuntungan ekonomi pariwisata dengan konservasi ekosistem laut secara berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa otonomi daerah harus didukung oleh kebijakan lokal yang kuat sinergi antar pihak pemanfaatan teknologi informasi dan keterlibatan masyarakat yang aktif agar pertumbuhan ekonomi daerah tidak bertentangan dengan prinsip kelestarian lingkungan.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah memberi kesempatan pemerintah daerah di Indonesia untuk memiliki lebih banyak kendali atas pembangunan di sekitar mereka sendiri (Ningsih, 2022), (Permatasari, et al., 2023) & (Ayu, et al., 2024). Dengan menyebarkannya ke daerah lain, pemerintah daerah dapat membuat keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan menyediakan dana untuk program pembangunan yang dianggap penting (Giroth, et al., 2022; Desembrianita, et al., 2024; Azra, 2024). Hal ini memfasilitasi kreativitas dan adaptasi yang lebih baik ke situasi lokal dan kebutuhan.

Suatu definisi evolusi yang bertujuan adalah pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sambil mempertahankan keadaan sosial dan lingkungan demi memberikan manfaat terbaik bagi generasi sekarang dan generasi berikutnya (Nasution, 2023); (Diaz, et al., 2023); (Meilina, 2022). Integrasi adalah komponen dari proses ini antara aspek ekonomi sosial dan lingkungan sehingga setiap tahapan pembangunan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek tetapi juga mempertimbangkan efek jangka panjang terhadap ekosistem dan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan berkelanjutan berusaha membuat sistem yang efektif dan inklusif yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat terhadap kesempatan dan sumber daya yang sama.

Meskipun otonomi daerah telah memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola kebijakan dan sumber daya dalam rangka mendorong pembangunan daerah serta pemberdayaan masyarakat lokal, pelaksanaannya sering kali menghadapi berbagai tantangan. Hal ini terlihat dari kasus Marine Geopark Natuna yang menunjukkan bahwa tanpa adanya kebijakan lokal yang kuat, sinergi antar pihak, pemanfaatan teknologi, dan keterlibatan masyarakat, potensi daerah sulit untuk dioptimalkan dan kelestarian lingkungan menjadi terancam.

Dalam konteks ini, pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting, di mana integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi kunci untuk memastikan bahwa

setiap tahap pembangunan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui inovasi kebijakan pembangunan berkelanjutan, dengan harapan dapat mengidentifikasi strategi yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan selaras dengan prinsip kelestarian lingkungan, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan.

KAJIAN TEORITIS

Konsep pemerintahan daerah merupakan terjemahan dari istilah *local government* yang pada dasarnya mencakup tiga pengertian, yaitu: pertama, merujuk pada pemerintah lokal; kedua, mengacu pada pemerintahan lokal; dan ketiga, berarti wilayah lokal (Hanif, 2007)

Berdasarkan hasil amandemen Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain, dikemukakan bahwa Pemerintah daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan daerah Kota memiliki hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Secara konseptual, pemerintahan daerah disamakan dengan konsep *local government*, yang pada dasarnya mencakup tiga pengertian, yakni pemerintah daerah, pemerintahan daerah, dan wilayah pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pemerintahan daerah dipengaruhi oleh lingkungan alamiah, lingkungan politik, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya.

Dalam konteks organisasi pemerintah, desentralisasi dapat dipahami sebagai konsekuensi dari interaksi yang terjadi antara lembaga pemerintah dengan kedudukan struktural yang berbeda, yaitu antara pemerintah di tingkat atas dengan yang berada di bawahnya. Pemahaman mengenai interaksi ini menekankan pada aspek kebebasan otoritas di tingkat bawah untuk mengelola dan menjalankan pemerintahan secara mandiri tanpa adanya campur tangan yang signifikan dari lembaga pemerintah di tingkat atas. Kebebasan dalam pengelolaan ini sering disebut sebagai *independence of localities*. Melalui pendekatan ini, desentralisasi diharapkan dapat mendorong terciptanya stabilitas

politik, efektivitas pelayanan publik, pengurangan angka kemiskinan, dan penciptaan keadilan di tengah masyarakat.

Teori mengenai bentuk negara otonomi merupakan bagian dari sistem negara kesatuan (unitary). Otonomi itu sendiri adalah fenomena yang terdapat dalam negara kesatuan, di mana semua pengertian dan substansi otonomi tersebut merupakan pemahaman tentang otonomi itu sendiri. Selanjutnya, berdasarkan batasan yang jelas tersebut, berbagai peraturan (rules) dikembangkan untuk mengatur mekanisme yang akan mewujudkan keseimbangan antara tuntutan kesatuan dan tuntutan otonomi.

Dalam hal stabilitas politik, desentralisasi akan mengurangi ketidakpuasan daerah terhadap sentralisme pemerintah pusat, terutama karena sumber daya yang diberikan kepada daerah oleh pemerintah pusat tidak seimbang dengan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dengan demikian desentralisasi diharapkan mampu mengurangi ketidakpastian politik dengan menghidupkan kembali lembaga dan proses politik di daerah.

Pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu penelitian yang relevan dan menjelaskan keseluruhan aspek tersebut adalah penelitian yang berjudul *“INTEGRASI TARGET DAN INDIKATOR SDGs KE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI JAWA TENGAH”* oleh (Sofianto A. , 2019). Dalam penelitian tersebut membahas konsep pembangunan berkelanjutan dengan menekankan prinsip integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dikenal dengan pendekatan Triple Bottom Line, di mana ketiga aspek tersebut harus berjalan seimbang dalam proses pembangunan. Penelitian ini juga secara spesifik menguraikan bagaimana implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) diterapkan di tingkat daerah melalui proses perencanaan pembangunan daerah, termasuk penyelarasan indikator global ke dalam kebijakan dan program pemerintah daerah. Dalam konteks ini, pemerintah daerah di Jawa Tengah berupaya menerjemahkan tujuan SDGs ke dalam kebutuhan lokal sesuai karakteristik wilayah, dengan fokus pada peningkatan partisipasi masyarakat, perlindungan lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan tidak hanya menjadi agenda nasional, tetapi juga menjadi acuan nyata dalam pembangunan daerah.

Inovasi kebijakan publik merupakan suatu proses yang melibatkan pengenalan metode, kebijakan, atau pendekatan baru dalam pelayanan serta perumusan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas dari kebijakan itu sendiri. Teori inovasi publik menekankan pentingnya internal determinant seperti kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya organisasi yang bersifat terbuka terhadap ide-ide baru serta regional diffusion, yang merujuk pada adopsi kebijakan berdasarkan inovasi yang telah berhasil diterapkan di daerah lain. Faktor-faktor pendorong mencakup kepemimpinan yang visioner, insentif, dukungan regulasi dan komunikasi, serta partisipasi publik yang aktif. Di sisi lain, hambatan utama sering kali disebabkan oleh birokrasi yang kaku, resistensi dari aparatur, keterbatasan dalam kapasitas sumber daya manusia dan pendanaan, serta tekanan administratif dan budaya yang enggan mengambil risiko. Model inovasi kebijakan pembangunan dapat terdiri dari inovasi administratif (perubahan dalam struktur dan mekanisme birokrasi), inovasi teknologis (pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik), dan inovasi sosial (pelibatan serta peran aktif masyarakat dalam perancangan dan pelaksanaan kebijakan).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) untuk memahami peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui inovasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ultavia dkk. (2023), penelitian kualitatif berdasarkan pada filsafat post positivisme yang bermanfaat untuk mengkaji objek yang alamiah, dengan peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data dan analisis data yang bersifat induktif. Metode studi pustaka dipilih karena penelitian ini fokus pada analisis mendalam terhadap berbagai teori, konsep, dan temuan empiris yang telah ada mengenai peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan laporan penelitian yang relevan. Menurut Zed (2008) yang dikutip dalam Ultavia dkk. (2023), terdapat empat langkah dalam penelitian pustaka yaitu mempersiapkan perlengkapan alat yang dibutuhkan, mempersiapkan daftar acuan kegiatan, mengorganisasikan durasi serta

membaca dan menulis materi penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun pemahaman komprehensif tentang fenomena yang diteliti berdasarkan sintesis dari berbagai sumber literatur yang relevan dan terpercaya. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dokumenter dan analisis dokumen yang merupakan bagian dari karakteristik pengumpulan data kualitatif. Data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, regulasi, jurnal penelitian, dan publikasi resmi yang berkaitan dengan ekonomi daerah dan pembangunan berkelanjutan. Analisis data menggunakan teknik analisis konten dan analisis deskriptif dengan tahapan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan sesuai dengan model yang dikemukakan dalam literatur. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, member checking, dan auditing untuk memastikan kredibilitas dan validitas hasil penelitian, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih inovatif dan berkelanjutan, yang dapat memberdayakan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Potensi Ekonomi Lokal

Pembangunan ekonomi daerah yang berbasis pada potensi lokal menuntut adanya pemahaman holistik terhadap karakteristik wilayah dan daya dukung sumber daya yang dimiliki. Potensi ekonomi lokal tidak hanya terbatas pada sektor primer seperti pertanian, kelautan, dan kehutanan, tetapi juga merambah pada sektor sekunder dan tersier, termasuk industri kreatif, ekonomi digital, dan jasa berbasis kearifan lokal. Sayangnya, dalam praktik di banyak daerah, pendataan potensi sering dilakukan secara administratif tanpa disertai analisis kuantitatif terhadap daya saing dan kontribusi sektoral terhadap PDRB daerah (Husna, 2013; Yulianti & Firmansyah, 2020). Salah satu kelemahan mendasar dalam pemetaan potensi lokal adalah ketiadaan kerangka metodologis yang baku di tingkat daerah. Banyak dokumen perencanaan seperti RPJMD dan Renstra SKPD menyusun sektor unggulan berdasarkan asumsi historis dan persepsi elite lokal, bukan hasil dari kajian akademik yang berbasis data makro dan mikro. Padahal, analisis *input-output*, *location quotient* (LQ), dan *shift-share* sangat penting untuk menentukan sektor mana yang secara faktual menjadi basis ekonomi daerah (Azzat & Mujiraharjo, 2020). Di

beberapa daerah, analisis ini belum dilakukan karena keterbatasan kapasitas teknis aparatatur perencanaan.

Sektor pertanian dan kelautan tetap menjadi tumpuan utama di sebagian besar kabupaten/kota non-metropolitan. Namun keberadaan sektor ini acapkali tidak dibarengi dengan nilai tambah yang signifikan akibat rendahnya industrialisasi pasca-panen. Contoh nyata dapat dilihat di wilayah pesisir Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Timur, di mana hasil laut melimpah, tetapi pengolahannya masih bersifat tradisional sehingga ketergantungan terhadap pasar luar tetap tinggi (Pratiwi & Nikensari, 2024). Di sisi lain, Kabupaten Sleman berhasil menjadikan pertanian terpadu sebagai sektor unggulan berbasis agrowisata melalui integrasi dengan pariwisata edukatif dan kuliner. Kawasan dengan potensi wisata budaya dan ekowisata seperti Gianyar, Tanah Toraja, dan Purbalingga mulai membangun sektor ekonomi baru dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya dan keunikan ekologis daerah. Di Desa Serang, Kabupaten Purbalingga, pariwisata berbasis pertanian stroberi menjadi motor penggerak ekonomi desa, memicu tumbuhnya homestay, kuliner lokal, dan koperasi wisata (Huda, 2020). Namun, transformasi semacam ini tidak dapat terjadi tanpa dukungan kelembagaan dan keberanian kepala daerah dalam melakukan inovasi lintas sektor.

Peningkatan daya saing daerah juga sangat tergantung pada keberhasilan dalam menghubungkan sektor unggulan dengan pasar yang lebih luas. Kota Surabaya, misalnya, mampu meningkatkan kapasitas sektor kreatif dan kuliner melalui dukungan ekosistem inkubasi UMKM dan digitalisasi pemasaran (Hariyoko & Puspaningtyas, 2020). Sebaliknya, di Kabupaten Gresik, walaupun terdapat potensi sektor industri dan pertanian, belum ada kebijakan afirmatif yang mendorong akselerasi potensi ini karena dominasi pendekatan birokratis dalam perencanaan pembangunan (Husna, 2013). Peran pemerintah daerah dalam mengorkestrasi ekosistem ekonomi yang inklusif menjadi krusial dalam konteks ini. Upaya pengembangan potensi ekonomi lokal juga harus memperhitungkan keberlanjutan sosial dan ekologi. Pertumbuhan ekonomi yang didorong secara eksploitatif tanpa perencanaan berkelanjutan justru akan menciptakan ketimpangan dan konflik sosial. Pendekatan ekonomi lokal berbasis klaster seperti yang diterapkan di Kabupaten Jepara melalui industri mebel ukir, jika tidak diimbangi dengan prinsip green economy, dapat berdampak buruk terhadap lingkungan hidup. Oleh karena

itu, strategi penguatan ekonomi daerah harus seimbang antara efisiensi ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial (Kembauw et al., 2015; Chatra et al., 2025).

B. Peran Strategis Pemerintah Daerah

Kehadiran pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam pembangunan ekonomi lokal tidak lagi bersifat administratif semata, tetapi juga strategis dan politis. Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah memberikan ruang kepada pemda untuk merancang kebijakan berbasis kebutuhan lokal. Hal ini menuntut peran pemerintah sebagai regulator yang tidak hanya menyusun aturan, tetapi juga menciptakan kepastian hukum dan kenyamanan berusaha. Instrumen seperti peraturan daerah, insentif pajak, dan kemudahan perizinan merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam membentuk iklim usaha yang kompetitif dan partisipatif (Riawati et al., 2022). Di banyak kabupaten/kota, keberhasilan pembangunan ekonomi ditentukan oleh sejauh mana pemerintah daerah dapat menyeimbangkan fungsi pengaturannya dengan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat. Misalnya, Pemerintah Kota Makassar mengadopsi kebijakan zonasi UMKM berbasis kecamatan yang memungkinkan penguatan sektor informal melalui pendekatan spasial. Kebijakan ini memungkinkan pemerintah mengintervensi lebih tepat sasaran dalam bentuk pelatihan, modal usaha, serta akses pasar (Nikensari, 2024). Di sisi lain, kebijakan yang bersifat sentralistik atau tidak adaptif terhadap dinamika lokal berpotensi menjadi beban struktural yang menghambat inovasi.

Fungsi fasilitasi pemerintah daerah memiliki spektrum yang luas, mulai dari menyediakan infrastruktur dasar hingga menjembatani kemitraan antara pelaku ekonomi dengan lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan investor. Peran ini sangat terlihat dalam praktik pembangunan ekonomi berbasis kawasan, seperti yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui penyediaan kawasan industri kecil menengah (IKM), inkubasi bisnis, serta pembentukan desa wisata yang dikelola bersama masyarakat (Nugroho, 2020). Melalui pendekatan ini, pemerintah tidak menjadi pelaksana utama pembangunan, tetapi menjadi enabler bagi inisiatif ekonomi warga. Sebagai katalisator, pemerintah daerah juga perlu mengembangkan kapasitas internal birokrasi untuk dapat merespon perubahan sosial dan ekonomi secara adaptif. Banyak daerah yang lambat berkembang karena rendahnya kapabilitas institusi daerah dalam mengelola kebijakan, terutama dalam bidang ekonomi kreatif dan digital. Perubahan

regulasi dan tantangan teknologi menuntut aparatur sipil negara untuk tidak hanya memahami prosedur, tetapi juga berpikir secara inovatif dan transformatif. Kabupaten Kulon Progo menjadi contoh praktik baik dalam hal ini dengan program “Bela Beli Kulon Progo” yang menghubungkan ASN sebagai konsumen utama produk lokal (Wibowo & Rachman, 2021).

Koordinasi lintas aktor juga menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas peran pemerintah daerah. Kolaborasi antara dinas teknis, BUMDes, komunitas lokal, hingga swasta harus diorkestrasi dalam kerangka tata kelola *multi-level governance*. Di Jawa Tengah, keberhasilan pengintegrasian tujuan SDGs ke dalam RPJMD tidak lepas dari mekanisme koordinasi antar dinas dan peran aktif Bappeda dalam mengharmonisasi target pembangunan sektoral (Sofianto, 2019). Pendekatan semacam ini menekankan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi lokal bukan hasil kerja satu institusi, melainkan hasil sinergi antara berbagai kepentingan yang saling melengkapi. Akhirnya, peran strategis pemerintah daerah harus dilihat sebagai proses dinamis yang terus berkembang seiring perubahan kebutuhan masyarakat dan tekanan global. Pemerintah tidak dapat lagi menggunakan pendekatan birokratis linier dalam merespon permasalahan ekonomi, tetapi harus mampu bertransformasi menjadi fasilitator cerdas, pembuka peluang, dan jembatan antara aspirasi lokal dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan ekonomi lokal tidak hanya bergantung pada potensi sumber daya, tetapi juga pada kualitas dan kapasitas kepemimpinan daerah dalam memfasilitasi perubahan yang berpihak pada masyarakat.

C. Inovasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

Inovasi kebijakan pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pembangunan daerah yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang (Schoenefeld, J. J., et al , 2022) . Konsep ini menekankan pada pentingnya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga mempertahankan kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.. Dalam konteks pemerintah daerah, inovasi kebijakan pembangunan berkelanjutan mencakup empat dimensi utama. Pertama, inovasi dalam perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan penggunaan

teknologi modern. Kedua, pengembangan ekonomi kreatif yang memanfaatkan potensi lokal dan teknologi digital. Ketiga, pengelolaan sumber daya alam yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau dan ekonomi sirkular. Keempat, pembentukan kemitraan strategis antara pemerintah, swasta, dan akademisi untuk menciptakan sinergi dalam pembangunan (Toffanin & Jezic von Gesseneck, 2022).

1. Inovasi dalam Perencanaan Pembangunan

Perencanaan partisipatif berbasis masyarakat telah menjadi salah satu inovasi penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Konsep ini memungkinkan pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Pendekatan partisipatif ini sejalan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada aspek sosial dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan (Margareta, P. S., & Salahudin, S., 2021). Melalui mekanisme seperti musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), forum konsultasi publik, dan survei aspirasi masyarakat, pemerintah daerah dapat memperoleh input yang lebih akurat mengenai potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan. Integrasi aspek lingkungan dalam rencana pembangunan merupakan inovasi yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini diwujudkan melalui penyusunan dokumen perencanaan yang mengintegrasikan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dalam setiap program pembangunan. Penggunaan teknologi dalam perencanaan (e-planning) telah membawa transformasi signifikan dalam efisiensi dan akurasi perencanaan pembangunan. Sistem informasi Kebijakan dukungan untuk industri kreatif dan UMKM telah menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. Dukungan ini diwujudkan melalui berbagai program seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, pendampingan teknis, dan kemudahan perizinan. Pemerintah daerah juga menciptakan regulasi yang mendukung pengembangan industri kreatif melalui pemberian insentif pajak, penyediaan ruang usaha dengan harga terjangkau, dan pembentukan sentra-sentra industri kreatif. Program inkubator bisnis dan co working space telah menjadi sarana penting dalam mengembangkan ekosistem kewirausahaan lokal yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi kreatif (Fazlagic & Szczepankiewicz, 2020). perencanaan yang terintegrasi

memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan analisis data yang lebih komprehensif, monitoring dan evaluasi yang real-time, serta koordinasi yang lebih baik antar instansi. Platform digital seperti sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) dan aplikasi perencanaan berbasis web telah memudahkan proses penyusunan rencana kerja dan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel (Nugraha et al., 2022). Dengan demikian, penerapan e-planning tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik, yang sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

2. Inovasi dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif

Kebijakan dukungan untuk industri kreatif dan UMKM telah menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. Dukungan ini diwujudkan melalui berbagai program seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, pendampingan teknis, dan kemudahan perizinan. Pemerintah daerah juga menciptakan regulasi yang mendukung pengembangan industri kreatif melalui pemberian insentif pajak, penyediaan ruang usaha dengan harga terjangkau, dan pembentukan sentra-sentra industri kreatif. Program inkubator bisnis dan co-working space telah menjadi sarana penting dalam mengembangkan ekosistem kewirausahaan lokal yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi kreatif (Fazlagic & Szczepankiewicz, 2020). Pengembangan ekosistem kewirausahaan lokal memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya wirausaha-wirausaha baru. Hal ini meliputi penyediaan infrastruktur pendukung, akses terhadap permodalan, jaringan pemasaran, dan transfer teknologi. Program mentoring dan coaching yang melibatkan pengusaha sukses dan akademisi juga menjadi bagian penting dalam membangun kapasitas wirausaha lokal. Pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran produk lokal telah membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk-produk ekonomi kreatif daerah. Platform e-commerce, media sosial, dan aplikasi mobile telah mempermudah akses pasar dan mengurangi biaya pemasaran, sehingga produk lokal dapat bersaing di pasar regional bahkan nasional. Selain itu, pelatihan kewirausahaan digital dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi untuk memperluas jaringan pemasaran mereka (Junaedi & Rojali, 2024).

3. Inovasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Kebijakan ekonomi hijau (green economy) telah menjadi paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pemerintah daerah mengimplementasikan konsep ini melalui berbagai program seperti pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, dan promosi produk-produk organik (Wahida, K., & Uyun, H., 2023). Pendekatan ekonomi hijau tidak hanya memberikan manfaat lingkungan tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program seperti pembangkit listrik tenaga surya skala rumah tangga, bank sampah, dan pertanian organik telah menjadi contoh nyata implementasi ekonomi hijau di tingkat lokal. Pengembangan ekowisata berkelanjutan merupakan strategi inovatif dalam memanfaatkan potensi alam dan budaya lokal untuk pembangunan ekonomi. Konsep ekowisata tidak hanya fokus pada aspek ekonomi tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pemerintah daerah berperan dalam mengembangkan regulasi yang mendukung ekowisata, penyediaan infrastruktur pendukung, dan promosi destinasi wisata yang berkelanjutan. Program pelatihan guide lokal, pengembangan homestay, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata telah menjadi bagian integral dari strategi pengembangan ekowisata. Pengelolaan limbah menjadi ekonomi sirkular merupakan inovasi yang mengubah perspektif limbah dari masalah menjadi peluang ekonomi. Konsep ini mengintegrasikan prinsip reduce, reuse, dan recycle dalam sistem ekonomi lokal, sehingga menciptakan nilai tambah dari material yang sebelumnya dianggap sebagai (Schützenhofer et al., 2022).

4. Inovasi dalam Kemitraan dan Kolaborasi

Public-private partnership (PPP) dalam pembangunan telah menjadi model inovatif yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber daya dalam pembangunan ekonomi lokal. Model kemitraan ini memadukan kekuatan sektor publik dan swasta dalam mengembangkan infrastruktur, layanan publik, dan program-program pembangunan ekonomi (Bednyakov, 2022). Keberhasilan PPP sangat bergantung pada kejelasan pembagian peran, transparansi dalam proses pengadaan, dan mekanisme monitoring yang efektif. Contoh implementasi PPP yang sukses dapat dilihat dalam

pengembangan infrastruktur transportasi, pengelolaan limbah, dan pengembangan kawasan industri yang melibatkan investasi swasta dengan dukungan kebijakan pemerintah. Kerjasama antar daerah untuk pengembangan ekonomi regional merupakan strategi yang semakin penting dalam era globalisasi. Pemerintah daerah menyadari bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dilakukan secara isolatif tetapi memerlukan sinergi dengan daerah lain. Bentuk kerjasama ini dapat berupa pengembangan kawasan ekonomi khusus lintas daerah, promosi pariwisata regional, dan pengembangan rantai pasok yang terintegrasi. Kolaborasi dengan universitas dan lembaga penelitian telah menjadi kunci dalam pengembangan inovasi dan transfer teknologi untuk mendukung ekonomi lokal. Kemitraan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengakses hasil-hasil penelitian terbaru, mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan menciptakan produk-produk inovatif yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

C. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan

Kebijakan publik di tingkat daerah menjadi instrumen utama dalam mengarahkan pembangunan ekonomi lokal. Namun demikian, antara perumusan dan pelaksanaan kebijakan seringkali terjadi kesenjangan baik secara administratif maupun teknis. Implementasi kebijakan ekonomi di daerah sangat bergantung pada struktur kelembagaan, kapasitas aparatur, serta dukungan politik dari aktor lokal. Dalam banyak kasus, kebijakan sudah dirumuskan dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan Renstra OPD, namun gagal diterjemahkan ke dalam program kerja yang bersifat operasional karena lemahnya perencanaan teknis dan keterbatasan SDM (Akib & Simatupang, 2011).

Mekanisme implementasi kebijakan yang ideal harus dimulai dari pemetaan kebutuhan dan kapasitas penerima manfaat. Namun yang sering terjadi adalah pendekatan top-down yang menyebabkan ketidaksesuaian antara kebijakan dengan kondisi lapangan. Contoh kasus ditemukan pada kebijakan pengembangan ekonomi mikro di Kabupaten Ngajuk, di mana protokol kesehatan diterapkan tanpa dukungan fasilitas pendukung seperti pelatihan digitalisasi dan penguatan kapasitas UMKM, sehingga justru menurunkan aktivitas ekonomi sektor informal (Muzaqi & Layfani, 2021). Hal ini menunjukkan pentingnya konsistensi antara tujuan kebijakan dengan desain

implementasi. Dalam aspek monitoring dan evaluasi (*Monev*), sejumlah daerah telah membentuk unit pengawasan internal yang terintegrasi dengan sistem pelaporan kinerja berbasis elektronik. Namun, sistem ini masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan yang dijalankan. Evaluasi masih sebatas *input* dan *output*, bukan pada *outcome* dan *impact*. Padahal, evaluasi berbasis hasil sangat diperlukan untuk mengukur perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Sidik, 2024). Keterbatasan indikator evaluasi juga menyulitkan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan berbasis bukti.

Keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi lokal sangat ditentukan oleh tiga faktor utama: pertama, integrasi antar perangkat daerah; kedua, partisipasi masyarakat dan pelaku ekonomi; dan ketiga, kesinambungan kepemimpinan politik. Pengalaman Kota Makassar menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor dalam pengembangan UMKM berhasil mempercepat distribusi program, karena didukung oleh sistem database terintegrasi antar dinas (Nikensari, 2024). Sebaliknya, di Bandung Barat, lemahnya komitmen politik dan koordinasi menyebabkan kebijakan penurunan kemiskinan tidak berjalan efektif meskipun anggaran tersedia (Iswardhana & Attamimi, 2023).

Tantangan utama dalam implementasi kebijakan ekonomi di daerah adalah rendahnya kapabilitas teknis dan fiskal, terutama di daerah tertinggal dan terluar. Ketiadaan tenaga analis kebijakan, kurangnya penguasaan teknologi, serta budaya birokrasi yang cenderung normatif menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan yang adaptif dan inovatif. Di sisi fiskal, ketergantungan pada Dana Alokasi Umum (DAU) juga mengurangi fleksibilitas daerah dalam mendesain kebijakan sesuai kebutuhan lokal (Taali & Maduwinarti, 2024). Tanpa adanya reformasi kelembagaan, implementasi kebijakan akan terus bersifat simbolik. Evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan oleh lembaga pemerintah, tetapi juga dapat melibatkan perguruan tinggi, LSM, dan masyarakat sipil sebagai mitra pengawas independen. Kolaborasi ini sudah mulai dilakukan di beberapa daerah seperti Yogyakarta dan Jawa Tengah, di mana akademisi dilibatkan dalam merancang indikator kinerja daerah berbasis SDGs. Langkah ini memberikan hasil yang lebih objektif dan menghindari bias politik dalam proses evaluasi. Namun, inisiatif seperti ini masih terbatas pada daerah dengan kultur partisipatif yang kuat dan tradisi akademik yang berkembang.

Dengan demikian, keberhasilan kebijakan ekonomi di daerah tidak hanya terletak pada aspek perumusannya, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas implementasi dan sistem evaluasi yang menyertainya. Pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas birokrasi, membangun sistem *Monev* berbasis dampak, serta menjamin keberlanjutan program di tengah dinamika politik lokal. Transformasi implementasi harus menjadi fokus utama bila pemerintah daerah ingin mengubah potensi menjadi kekuatan ekonomi nyata.

D. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan

Kebijakan publik di tingkat daerah menjadi instrumen utama dalam mengarahkan pembangunan ekonomi lokal. Namun demikian, antara perumusan dan pelaksanaan kebijakan seringkali terjadi kesenjangan baik secara administratif maupun teknis. Implementasi kebijakan ekonomi di daerah sangat bergantung pada struktur kelembagaan, kapasitas aparatur, serta dukungan politik dari aktor lokal. Dalam banyak kasus, kebijakan sudah dirumuskan dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan Renstra OPD, namun gagal diterjemahkan ke dalam program kerja yang bersifat operasional karena lemahnya perencanaan teknis dan keterbatasan SDM (Akib & Simatupang, 2011).

Mekanisme implementasi kebijakan yang ideal harus dimulai dari pemetaan kebutuhan dan kapasitas penerima manfaat. Namun yang sering terjadi adalah pendekatan top-down yang menyebabkan ketidaksesuaian antara kebijakan dengan kondisi lapangan. Contoh kasus ditemukan pada kebijakan pengembangan ekonomi mikro di Kabupaten Ngajuk, di mana protokol kesehatan diterapkan tanpa dukungan fasilitas pendukung seperti pelatihan digitalisasi dan penguatan kapasitas UMKM, sehingga justru menurunkan aktivitas ekonomi sektor informal (Muzaqi & Layfani, 2021). Hal ini menunjukkan pentingnya konsistensi antara tujuan kebijakan dengan desain implementasi. Dalam aspek monitoring dan evaluasi (*Monev*), sejumlah daerah telah membentuk unit pengawasan internal yang terintegrasi dengan sistem pelaporan kinerja berbasis elektronik. Namun, sistem ini masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan yang dijalankan. Evaluasi masih sebatas *input* dan *output*, bukan pada *outcome* dan *impact*. Padahal, evaluasi berbasis hasil sangat diperlukan untuk mengukur perubahan yang signifikan terhadap

kesejahteraan masyarakat (Sidik, 2024). Keterbatasan indikator evaluasi juga menyulitkan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan berbasis bukti.

Keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi lokal sangat ditentukan oleh tiga faktor utama: pertama, integrasi antar perangkat daerah; kedua, partisipasi masyarakat dan pelaku ekonomi; dan ketiga, kesinambungan kepemimpinan politik. Pengalaman Kota Makassar menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor dalam pengembangan UMKM berhasil mempercepat distribusi program, karena didukung oleh sistem database terintegrasi antar dinas (Nikensari, 2024). Sebaliknya, di Bandung Barat, lemahnya komitmen politik dan koordinasi menyebabkan kebijakan penurunan kemiskinan tidak berjalan efektif meskipun anggaran tersedia (Iswardhana & Attamimi, 2023).

Tantangan utama dalam implementasi kebijakan ekonomi di daerah adalah rendahnya kapabilitas teknis dan fiskal, terutama di daerah tertinggal dan terluar. Ketiadaan tenaga analis kebijakan, kurangnya penguasaan teknologi, serta budaya birokrasi yang cenderung normatif menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan yang adaptif dan inovatif. Di sisi fiskal, ketergantungan pada Dana Alokasi Umum (DAU) juga mengurangi fleksibilitas daerah dalam mendesain kebijakan sesuai kebutuhan lokal (Taali & Maduwinarti, 2024). Tanpa adanya reformasi kelembagaan, implementasi kebijakan akan terus bersifat simbolik. Evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan oleh lembaga pemerintah, tetapi juga dapat melibatkan perguruan tinggi, LSM, dan masyarakat sipil sebagai mitra pengawas independen. Kolaborasi ini sudah mulai dilakukan di beberapa daerah seperti Yogyakarta dan Jawa Tengah, di mana akademisi dilibatkan dalam merancang indikator kinerja daerah berbasis SDGs. Langkah ini memberikan hasil yang lebih objektif dan menghindari bias politik dalam proses evaluasi. Namun, inisiatif seperti ini masih terbatas pada daerah dengan kultur partisipatif yang kuat dan tradisi akademik yang berkembang.

Dengan demikian, keberhasilan kebijakan ekonomi di daerah tidak hanya terletak pada aspek perumusannya, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas implementasi dan sistem evaluasi yang menyertainya. Pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas birokrasi, membangun sistem *Monev* berbasis dampak, serta menjamin keberlanjutan program di tengah dinamika politik lokal. Transformasi implementasi harus menjadi fokus utama bila pemerintah daerah ingin mengubah potensi menjadi kekuatan ekonomi nyata.

E. Dampak terhadap Ekonomi Lokal dan Keberlanjutan

Indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah Implementasi inovasi kebijakan pembangunan berkelanjutan oleh pemerintah daerah menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Sesuai dengan temuan penelitian bahwa pembangunan wilayah dapat berorientasi pada penciptaan keunggulan daya saing yang berkelanjutan, dengan menggali potensi daerah, program program inovasi kebijakan telah berhasil meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui optimalisasi sumber daya lokal (Song et al., 2022). Peningkatan produktivitas sektor UMKM lokal menunjukkan tren positif yang konsisten, sementara kontribusi terhadap PAD mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa penanaman modal yang efektif dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan daya tarik investasi lebih lanjut. Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat Inovasi kebijakan pembangunan berkelanjutan memberikan dampak multidimensional terhadap kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran mengalami penurunan yang signifikan dengan tercipta lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis komunitas. Peningkatan pendapatan rumah tangga terjadi secara substansial melalui program pemberdayaan ekonomi lokal yang terintegrasi dengan prinsip keberlanjutan. Akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan meningkat signifikan, dengan indeks pembangunan manusia (IPM) mengalami kenaikan yang terukur dalam periode evaluasi (Galipeau, D., 2022). Dampak positif ini mengkonfirmasi bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang selaras dengan potensi sumber daya daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi terhadap Kelestarian Lingkungan Dimensi keberlanjutan lingkungan menjadi komponen integral dalam setiap inovasi kebijakan yang diimplementasikan. Program ekonomi hijau telah berhasil mengurangi emisi karbon secara signifikan melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dan pengembangan energi terbarukan. Konservasi sumber daya alam mengalami peningkatan

dengan bertambahnya luas kawasan konservasi dan implementasi sistem pengelolaan limbah berbasis komunitas. Indeks kualitas lingkungan hidup menunjukkan perbaikan yang konsisten, dengan peningkatan kualitas air dan udara di wilayah kajian (Raihan et al., 2023). Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menetapkan peraturan dan kebijakan untuk mencegah eksploitasi sumber daya yang tidak bertanggung jawab sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui inovasi kebijakan pembangunan berkelanjutan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keberhasilan ini memerlukan komitmen jangka panjang dan kolaborasi multi stakeholder untuk memastikan sustainability dari setiap program yang diimplementasikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi lokal tidak hanya terbatas pada pelaksanaan kebijakan, melainkan juga sebagai penggerak utama inovasi yang responsif terhadap potensi dan tantangan yang ada di tingkat lokal. Inovasi dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan yang menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melestarikan sumber daya alam. Perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri kreatif, penerapan prinsip ekonomi hijau, dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan merupakan faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan di daerah. Namun, keberhasilan tersebut sangat tergantung pada kapasitas birokrasi, dukungan politik, dan keberlanjutan dalam evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen jangka panjang untuk membangun sistem pemerintahan daerah yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada hasil, agar potensi ekonomi lokal dapat benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

Akib, H. &. (2011). Efektivitas implementasi dan dampak kebijakan dalam konteks desentralisasi pemerintah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 89-104. doi:<http://dx.doi.org/10.26858/jiap.v2i1.871>

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Azzat, N. N. (2020). Analisis dan pemetaan produk unggulan daerah Kabupaten Jepara sebagai upaya peningkatan perekonomian daerah berbasis ekonomi lokal. *Jurnal Riset Manajemen*, 1(2), 44-58.
- Bednyakov, A. S. (2022). Public-Private Partnership as a Model of Public Infrastructure Development. doi:<https://doi.org/10.24833/2071-8160-2022-1-82-143-173>
- Chatra, A. D. (n.d.). *Potensi dan sektor unggulan ekonomi desa*. Buku Referensi Pembangunan Desa. Retrieved from <https://books.google.com/books?hl=id&id=2zZcEQAAQBAJ>
- Fazlagić, J. &. (2020). The role of local governments in supporting creative industries—a conceptual model. *I2*(1), 438.
- Galipeau, D. (2022). A New Era of Sustainable Innovation. In *Business and Management in Asia: Digital Innovation and Sustainability*.
- Giroth, I. G. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Maluku Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*, 212-223.
- Hariyoko, Y. &. (2020). Perencanaan pengembangan sektor unggulan Kota Surabaya. *5*(1), 1-12.
- Huda, R. (2020). Pengembangan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. *Aspirasi: Jurnal Sosial*, 11(2), 100-115. doi:<https://doi.org/10.46807/ASPIRASI.V11I2.1470>
- Husna, N. (2013). Analisis pengembangan potensi ekonomi lokal untuk menguatkan daya saing daerah di Kabupaten Gresik. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 2(3), 100-112.
- Iswardhana, M. R. (2023). Efektivitas penerapan kebijakan otonomi daerah dalam penurunan kemiskinan di Bandung Barat. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 7(1), 45-59.
- Kembauw, E. S. (2015). Sektor pertanian sebagai sektor unggulan terhadap pembangunan ekonomi Provinsi Maluku. *Agriekonomika*, 4(1), 75-85.
- Kusumaatmadja, M. (2002). Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan. .
- Malahati, F. J. (2023). Kualitatif: Memahami karakteristik penelitian sebagai metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341-348.
- Margareta, P. S. (2021). Community participation in regional development planning: A literature review. . *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen*, 121-132.
- Meilina, R. Y. (2022). Strategi Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif Berkelanjutan Melalui Agenda Tahun Ekonomi Kreatif Internasional. INDEPENDEN: *Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 3(2), 63-74.
- Muzaqi, A. H. (2021). . Implementasi kebijakan protokol kesehatan dan dampaknya terhadap ekonomi mikro di Kabupaten Ngajuk. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 3(2), 55-72. doi:<https://doi.org/10.30737/MEDIASOSIAN.V5I2.2070>

- Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. Harfa Creative.
- Nikensari, S. I. (2024). Evaluasi program UMKM Kota Makassar. *eCo-Fin*, 6(2). doi:<https://doi.org/10.32877/ef.v6i2.1405>
- Ningsih, W. P. (2022). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mekar Jaya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(4), 157-165.
- Nugraha, N. N. (2021, June). Design and development of information technology-based e-participatory application in participative development planning. . In *Journal of Physics: Conference Series*, 1933.
- Nugroho, H. (2020). Pembangunan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata berbasis digital di Banyuwangi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 5(2), 145-160.
- Permatasari, Y. J. (2023). Regional Autonomy in the Context of Regional Regulations. *Asian Journal of Social and Humanities*, 9(1), 431-439.
- Pratiwi, N., & Nikensari, S. I. (2024). Analisis potensi sektor ekonomi unggulan Kota Makassar sebagai kota metropolitan baru di kawasan timur Indonesia. *eCo-Fin*, 6(1), 22–34. <https://jurnal.kdi.or.id/index.php/ef/article/view/1405>
- Raihan, A. P. (2023). The role of renewable energy use, technological innovation, and forest cover toward green development: Evidence from Indonesia. *Innovation and Green Development*, 2(1). doi:<https://doi.org/10.1016/j.igd.2023.100035>
- Raihana, S. &. (2024). Penguatan ekonomi kreatif lokal melalui pelatihan kewirausahaan digital di komunitas masyarakat. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 33-41.
- Riawati, N. F. (2022). Pengembangan ekonomi lokal Kabupaten Bondowoso melalui kajian potensi klaster industri kecil. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(1), 55-70. doi:<https://doi.org/10.23887/jish.v11i2.34175>
- Rohim, A. (2024). Dampak Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Lokal. *PATTIMURA Legal Journal*, 3(3), 178-191.
- Schoenefeld, J. J. (2022). Policy innovation for sustainable development. In *Handbook on the governance of sustainable development*. 161-174.
- Schützenhofer, S. K. (2022). Improvement of environmental sustainability and circular economy through construction waste management for material reuse. *14*(17).
- Setiady, T. &. (2023). Kedudukan Otonomi Daerah sebagai Pondasi dalam Pembangunan Ekonomi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(3), 59-72.
- Sidik, F. (2024). Evaluasi kebijakan zonasi dan kualitas sekolah. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 10(2), 35-47.
- Sofianto, A. (2019). INTEGRASI TARGET DAN INDIKATOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) KE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI JAWA TENGAH. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 1(17), 25-41.
- Song, H. Z. (2022). The impact of sustainable input on regional innovation performance: moderating effects of policy support and cultural value. *14*(19).

- Sudiro, A. (1997). Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia dan Permasalahannya. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taali, M. &. (2024). *Teori dan model evaluasi kebijakan*. . Jakarta: Prenadamedia.
- Toffanin, R. &. (2022). Implementing systemic innovation strategies for a more sustainable future: The case of three overseas countries and territories. *Frontiers in Research Metrics and Analytics*.
- Wahida, K., & Uyun, H. (2023). Tatanan Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui green economy. *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial*, 1(2), 14-26.
- Wibowo, A. &. (2021). Strategi pemerintah daerah dalam mendukung produk lokal melalui program bela beli. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 22-35. doi:<https://doi.org/10.20885/jap.vol7.iss1.art2>
- Yulianti, N. &. (2020). Analisis potensi sektor unggulan Kota Balikpapan dalam mempersiapkan ibu kota baru dari perspektif ekonomi pertahanan. *Jurnal Keuangan dan Moneter*, 7(1), 13-28.